

EVALUASI IMPLEMENTASI KINERJA APARATUR DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN USAHA INDUSTRI KECIL PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPM-PD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sari Banun¹, Djumadi², Rosa Anggraeiny³

Abstrak

Berdasarkan hasil evaluasi mengenai kinerja aparatur dalam penyaluran bantuan dana untuk usaha industri kecil sebagaimana yang diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26/Pemprov-KB/VIII/2008 tentang Penyaluran Dana Usaha industri Kecil secara implementatif meskipun dihadapkan oleh beragamnya kemampuan aparatur tetapi penyaluran dana bantuan termasuk cukup efektif. Kurang optimalnya kinerja aparatur disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kapasitas dan kompetensi petugas pelaksana masih terbatas, kurang ditunjang dengan kecakapan dan keterampilan aparatur yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program serta diantara petugas pelaksana melakukan perangkapan pekerjaan.

Kata Kunci : *Evaluasi, Rasa Tanggungjawab, Disiplin, Prestasi Kerja, Prakarsa, Semangat dan Obyektif*

Pendahuluan

Pada era pembangunan pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai harapan tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2001 tentang Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin. Disamping itu adanya kebijakan lain melalui Instruksi Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Meskipun upaya yang dilakukan dapat membawa perubahan dan perbaikan terhadap kehidupan masyarakat, tetapi perubahan tersebut belum signifikan. Meski

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman

demikian pemerintah tidak berhenti dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, bahkan upaya terus dilakukan, yaitu meninstruksikan kepada daerah agar memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dunia usaha. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka pemerintah Gubernur telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Gubernur. Nomor 26/Pemprov-KB/VIII/2008, tentang Penyaluran Bantuan Dana kepada Usaha industri kecil.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, mengingat secara logika rasional dengan penyaluran dana bantuan melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat berkembangnya usaha industri kecil. Tetapi dalam kenyataannya dana bantuan sudah disalurkan namun kondisi usaha industri kecil belum semuanya mengalami kemajuan yang signifikan atau mampu meningkatkan hasil usaha secara optimal.. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap mengenai fenomena yang terjadi di objek penelitian, terutama mengenai kinerja aparatur dalam penyaluran dana banduan untuk usaha industri kecil.

Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan

Sesuai visi dan misi pemerintah provinsi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Tata Pemerintahan Yang baik, maka untuk mencapai hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran bantuan dana untuk peningkatan modal kerja atau investasi yang disediakan untuk membantu usaha industri kecil dalam rangka pengembangan usaha, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera. Menginringi upaya tersebut maka pemerintah provinsi telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan. Gubernur Kaltim Nomor 26/Pemprov-KB/VIII/2008, tentang Penyaluran Bantuan Dana kepada Usaha industri kecil. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro/usaha kecil, agar para usaha industri kecil lebih produktif dan berkembang Mengingat selama ini faktor modal usaha menjadi kendala dalam usaha pengembangan industri kecil, maka dengan diberikan bantuan modal usaha dapat mendukung kelancaran usaha. Dengan demikian, dapat memperkuat modal usaha untuk meningkatkan daya saing di segment pasar.

Adapun persyaratan untuk mendapat kan modal usaha melalui bantuan dana tersebut, sebagaimana yang diatur berda-sarkan keputusan Gubernur kalimantan Timur dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

Usaha disemua sector ekonomi dengan maksimal kekayaan diluar tanah dan bangunan Rp. 25.000.000,- baik berbentuk kelompok atau perorangan.

b. Usaha Kecil

Kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil memenuhi kriteria Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yaitu :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - 2) Memiliki hasil penjualan maksimal Rp.1.000.000.000,-
 - 3) Milik Warga Negara Indonesia;
 - 4) Berdiri sendiri bukan anak cabang perusahaan atau cabang perusahaan;
 - 5) Berbentuk usaha perorangan tidak berbadan hukum termasuk koperasi.
- c. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.

Adapun prosedur penyaluran dana bergulir didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Usaha mikro, usaha kecil dan koperasi mengajukan proposal kepada pokja dengan mengisi formulir yang telah disediakan
- b. Pokja mengadakan seleksi administrasi kelengkapan permohonan
- c. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan
- d. Hasil peninjauan lapangan dirapatkan oleh Tim Teknis untuk bahan rekomendasi kepada Ketua Rapat
- e. Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada Ketua Pokja
- f. Penetapan usaha mikro, kecil dan koperasi terpilih dalam surat keputusan Ketua Pokja
- g. Pokja menyampaikan surat keputusan tersebut kepada Bank Pembangunan Daerah beserta kelengkapannya.

Sedangkan tata cara pencairan bantuan dana bergulir adalah :

- a. Usaha mikro, kecil dan koperasi membuka rekening tabungan di Bank Pelaksana untuk menampung transfer dan bergulir yang akan disalurkan;
- b. BPD meneliti kelengkapan berkas yang diserahkan pokja dan melakukan akad kredit dengan penerima pinjaman yang telah disetujui pokja;
- c. BPD mentrasfer dana bergulir dari rekening Pemkot ke rekening peminjam sesuai Surat Keputusan Pokja;
- d. Penerima Pinjaman dapat mencairkan danaya sesuai dengan rencana yang disusun.

Pemanfaatan dan mekanisme pemba-yaran bunga atas perolehan dana tersebut, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dikenakan bunga sebesar 6 % pertahun dengan pengelokasian sebagai berikut :

- a. 2 % dibayar kepada Bank sebagai pembayaran jasa atas pembinaan, pemantauan dan pengawasan;
- b. 2 % dibukukan kerekening pokja sebagai dana pembinaan;
- c. 2 % dikembalikan kepada pengusaha kecil dan koperasi apabila mengem-balikan pinjaman tepat pada waktunya. Jika tidak tepat waktu bunga tersebut dimasukkan kerekening Pemkot Bontang sebagai penambahan modal.

Usaha Industri Kecil

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dijelaskan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu : industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, pengubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.

Menurut Biro Pusat Statistik (1993 :53) industri kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang tenaga yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Dengan demikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor industri kecil dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyai peran strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat. Dalam perkembangannya industri kecil membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, peningkatan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pembangunann industri kecil disebar luaskan ke seluruh wilayah melalui penetapan pusat pertumbuhan industri kecil, sentra industri, lingkungan industri.

Fungsi dari pusat-pusat pertumbuhan industri menurut Syahrudin (1989 :45) sebagai berikut :

1. Sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran;
2. Sebagai tempat pelengkap peralatan yang tidak dipergunakan bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk;
3. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah terbatas pengusaha industri kecil.

Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan industri ini diharapkan hasil produksi dapat lebih meningkat yang disertai dengan peningkatan mutu produksi sehingga menjadi suatu hasil produksi dengan daya jual yang tinggi. Dari uraian tersebut maka dapat diperoleh gambaran bahwa industri kecil mempunyai investasi modal yang relatif kecil, sedangkan ketrampilan yang dimiliki biasanya bersifat turun menurut, serta dengan penggunaan teknologi yang masih sederhana.

Metode Penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi :

1. Evaluasi Implementasi Kinerja Aparatur Dalam Penyaluran Dana Bantuan Usaha industri Kecil meliputi :
 - a. Kemampuan aparatur dalam penyaluran dana
 - b. Efektivitas kinerja aparatur dalam penyaluran bantuan pada usaha industri kecil
 - c. Keterampilan dan keahlian aparatur pelaksana dalam penyaluran dana bantuan
 - d. Kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan penyaluran dana bantuan pada Usaha Industri kecil
 - e. Kerja sama / koordinasi antar petugas pelaksana dalam menyalurkan bantuan dana pada usaha industri kecil.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan penghambat Implementasi Kinerja Aparatur Dalam Penyaluran Dana Bantuan Usaha industri Kecil pada Badan Pemberdayaa Masyarakat – Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini meliputi :

- a. Informan : Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposif sampling. Kemudian untuk mentukan informan dilakukan dengan cara *snow ball sampling* sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. Dalam hal ini jumlah informan bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak tergantung dari : 1) tepat tidaknya pemilihan informan; 2) kompleksitas dan keragaman fenomena yang diteliti. Informan yang dimaksud adalah subjek penelitian yang mengetahui seluk beluk masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai informan adalah para usaha industri kecil, dan petugas pelaksana, sedangkan sebagai key informan adalah Kepala Badan Pemberdayaa Masyarakat – Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Tempat dalam hal ini meliputi lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan alam dan keadaan sosial budaya. Atas dasar karakteristik wilayah inilah peneliti memungkinkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan fokus penelitian.
- c. Dokumen-Dokumen : Sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan daerah, laporan tahunan dan bahan-bahan laporan lain serta arsip.

Hasil Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kinerja aparatur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPM-PD) Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan evaluasi. Sesuai hasil evaluasi mengenai kinerja aparatur dalam penyaluran dana bantuan pada usaha industri kecil, maka berdasarkan sub fokus penelitian yang ditetapkan dapat dideskripsikan berikut ini.

Kemampuan Aparatur dalam Penyaluran Dana

Kemampuan aparatur dalam penyaluran dana merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan aparatur dalam melaksanakan /menyalurkan dana bantuan kepada usaha industri kecil. Dari hasil observasi mengenai kemampuan aparatur menjalankan tugasnya sebagai pelaksana program cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam melaksanakan tugasnya mulai dari pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pemohon, memasukkan data di komputer dan melakukan pemben-~~delan~~, pendistribusian bantuan, hingga pembuatan laporan telah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan kerja. Kemudian didukung dengan pendapat beberapa informan mengatakan bahwa kemampuan aparatur pelaksana dalam menyalurkan bantuan kepada para pengusaha industri kecil termasuk cukup efektif. Misalnya dalam proses validasi sampai dengan menyerahkan berkas kepada Ketua Pokja cukup singkat, sehingga langsung diproses pada tahap berikutnya yaitu mengirim data kepada Bank yang di tunjuk, dalam hal ini adalah Bank Kaltim sebagai partner pemerintah provinsi dalam hal menyalurkan dana. Soal kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya dalam menyalurkan bantuan modal usaha kepada para pengusaha industri kecil, karena didukung dengan kapasitas dan kompetensi aparatur, Dari jumlah aparatur yang terlibat dalam penyaluran bantuan minimal berpendidikan minimal SLTA sebanyak 5 orang atau 62,50 %, dan lulusan tingkat Sarjana 2 orang atau 25 %. Jika diamati dari tingkat pendidikan formal yang dimiliki aparatur pelaksana sebagian besar berpendidikan menengah ke bawah. Secara struktural penempatan pegawai disusun berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Secara representatif keadaan petugas pelaksana penyaluran dana di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dapat dikatakan cukup mendukung pelaksanaan tugas mereka.

Efektivitas Kerja Aparatur dalam Penyaluran Bantuan Pada Usaha Kecil

Sub fokus berikutnya yang ditetapkan sebagai parameter untuk mengukur kinerja aparatur dalam penyaluran bantuan modal usaha dapat dilihat dari efektivitas kerja aparatur dalam menyalurkan modal usaha kepada usaha industri kecil. Dari hasil observasi diobjek penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan dana kepada usaha industri kecil termasuk cukup efektif atau sebagian besar tepat sasaran. Hal tersebut terindikasi oleh penyampaian

bantuan yang disalurkan pada pengusaha industri kecil termasuk cukup efektif, baik ditinjau dari segi waktu maupun kelompok sasaran. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan kerjasama personel dengan tim pendamping serta didukung dengan sarana dan prasarana penunjang. Meskipun dalam penyaluran bantuan dana untuk modal usaha bagi usaha industri kecil belum optimal tetapi dari tindakan yang dilakukan oleh tim pelaksana ditinjau dari segi waktu dan sasaran termasuk cukup efektif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan, bahwa kinerja aparatur dalam menyalurkan bantuan modal usaha kepada para pemiliki usaha industri kecil dikatakan cukup efektif.

Ketrampilan dan Keahlian Aparatur

Sub fokus berikutnya yang diukur dari kinerja aparatur dalam penyaluran bantuan dana kepada usaha industri kecil adalah keterampilan dan keahlian aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Keterampilan dan keahlian merupakan modal kerja aparatur, karena itu untuk kelancaran dalam menyalurkan bantuan modal kerja jika didukung dengan keterampilan dan keahlian sesuai bidang kerjanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber dapat diidentifikasi bahwa ketrampilan dan keahlian yang dimiliki petugas, cukup menunjang kelancaran tugas. Keterampilan yang dimiliki bukan hanya pada bidang administrasi tetapi juga pada kemampuan dalam mengaplikasikan fasilitas kerja seperti penggunaan terhadap sarana komputer termasuk cukup baik. Kemampuan dan keterampilan aparatur lain dapat diketahui dari cara menjelaskan dengan calon pemohon bantuan dana modal usaha, termasuk baik atau dapat dimengerti dan dipahami pemohon.

Keterampilan dan keahlian aparatur dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim pelaksana penyalur bantuan dana ternyata dari 8 orang diantaranya terdapat 3 orang yang memiliki legalitas pelatihan, antara lain bidang administrasi umum, bendaharawan dan kearsipan. Disamping itu juga memiliki keterampilan dan keahlian dibidang komputer dan akuntansi dasar. Dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki dapat dijadikan sebagai modal kerja dalam rangka kelancaran tugas.

Kedisiplinan Aparatur dalam Melaksanakan Tugas

Sub fokus berikutnya yang ditetapkan sebagai parameter untuk mengukur kinerja aparatur dalam penyaluran bantuan dana pada usaha industri kecil adalah disiplin kerja. Disiplin kerja faktor penting dalam mencapai tujuan, apalagi terkait dengan penyaluran bantuan dana kepada usaha industri kecil, faktor disiplin harus diefektifkan. Terutama dalam memanfaatkan jam kerja harus tepat waktu dan terhadap perbuatan harus memenuhi etika. Oleh karena itu cukup beralasan jika disiplin kerja merupakan determinan penting untuk menunjang efektivitas dalam penyaluran bantuan dana pada usaha industri kecil.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai kedisiplinan petugas penyaluran modal kecil di Kota Samarinda ditinjau dari segi disiplin waktu kerja belum menunjukkan tingkat disiplin yang optimal. Karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penegakan disiplin terhadap pemanfaatan jam kerja yang telah ditentukan. Dalam kenyataannya masih ada petugas yang nampak masih kurang mampu memanfaatkan jam kerja produktif secara efektif, seperti terlambat masuk kerja, meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas, dan pulang sebelum waktunya. Tindakan petugas yang belum menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan, masih belum optimal dalam memegang teguh etika pegawai negeri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan bahwa disiplin kerja pegawai di lingkungan kerja lembaga ini secara akumulatif belum menunjukkan tingkat disiplin yang baik karena masih terdapat beberapa pegawai yang kurang mampu memanfaatkan jam kerja secara efektif seperti terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya. Kurang optimalnya disiplin kerja petugas pelaksana program tersebut disebabkan selain kurangnya kesadaran pegawai terhadap jam kerja, juga masih tingginya toleransi atasan kepada bawahan. Karena selama ini teguran-teguran terhadap pegawai yang melanggar disiplin kerja justru kurang keras, sehingga pegawai tidak merasa jera atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja pegawai belum efektif, dan hal tersebut dapat diketahui dari kedisiplinan terhadap waktu kerja dan kedisiplinan dalam mekanisme kerja atau prosedur kerja dapat dikatakan bahwa tingkat kedisiplinan petugas belum optimal. Hal ini karena masih ada petugas yang tidak tepat waktu datang sehingga menyebabkan pelayanan tidak optimal dan kurangnya sarana penunjang transportasi bagi petugas survai (tim teknis).

Kerjasama Antar Petugas Pelaksana dalam Menyalurkan Bantuan Dana Pada Usaha Kecil

Sub fokus berikutnya yang ditetapkan sebagai parameter untuk mengukur kinerja aparatur dalam penyaluran bantuan dana pada usaha industri kecil adalah kerjasama tim pelaksana. Kerjasama mutlak diperlukan karena prosedur kerja yang harus ditempuh dalam penyelesaian berbagai bentuk pekerjaan tidak hanya selesai dalam satu meja. Kolektifitas perlu dibentuk dan dijaga mengingat pekerjaan satu mempunyai keterkaitan dengan lainnya. Sikap acuh tak acuh dan perilaku mau bekerjasama seringkali ditampakkan oleh pegawai karena sifat egoisme, sehingga jika sikap dan perilaku ini berkembang dalam diri pegawai akan berakibat kepada terhambatnya pencapaian tujuan organisasi yang berarti kinerja organisasi juga terganggu.

Kinerja petugas ditinjau dari aspek kerjasama antar petugas pelaksana penyaluran dana untuk usaha industri kecil di Kota Samarinda sangat penting untuk diketahui, sejauhmana sikap dan perilaku kerjasama yang dimiliki oleh

setiap pegawai. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai koordinasi/kerjasama petugas, dalam penelitian ini penulis menerapkan indikator koordinasi antar petugas dan koordinasi antar lembaga (pemerintah dengan pihak Bank). Sesuai hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun selami ini cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dalam memikul tanggung jawab terhadap pelaksanaa program penyaluran bantuan kepada usaha industri kecil, diantara anggota saling saling membantu, dan saling melengkapi sehingga penyaluran bantuan dalam dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua tim bahwa dalam pelaksanaan program telah terjalin kerjasama yang baik diantara petugas pelaksana dan kerjasama dengan instansi terkait.

Faktor-faktor yang Menghambat Kinerja Aparatur dalam Penyaluran Bantuan dana Pada Usaha Industri Kecil.

Berkenaan dengan implementasi penyaluran bantuan dana kepada usaha industri kecil ternyata dihadapkan pada suatu persoalan yang menghambat. Dari hasil evaluasi faktor yang menghambat sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang memiliki keterampilan dan keahlian masih terbatas, hal ini terkait dengan status pegawai dimana masih terdapat 2 orang yang memiliki pendidikan menengah ke bawah, sehingga kurang kompeten dalam melaksanakan tugas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, terutama komputer dan sarana transportasi sepeda motor untuk keperluan survai. Selama ini kendaraan yang dipakai merupakan milik pribadi petugas.
3. Petugas merupakan pegawai di bagian Pemberdayaan Masyarakat di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BMP-PD) terjadi perangkapan pekerjaan, denagn demikian berpengaruh terhadap beban kerja yang relatif bertambah dan tingkat konsentrasi yang kurang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagai mana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Usaha kepada Industri Kecil sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26/Pemprov-KB/VIII/2008 tentang Penyaluran Dana Usaha industri Kecil secara implemen-tatif cukup efektif. Dari hasil evaluasi ternyata dari parameter yang dijadikan sebagai tolok ukur belum sepenuhnya efektif. Meskipun demikian penyaluran dana bantuan yang disampaikan kepada para pengusaha industri kecil mampu memberikan nilai manfaat untuk mendukung modal usaha. Meskipun secara akumulatif penmyaluran dana untuk modal usaha industri kecil belum sepenuhnya mencapai kelompok

- sasaran, tetapi dari tindakan yang dilakukan telah menunjukkan perkembangan yang berarti bagi para usaha industri kecil dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan keluarga.
2. Sesuai hasil wawancara dengan informan dan key informan, serta hasil observasi di objek penelitian, bahwa kinerja aparatur ditinjau dari parameter yang ditetapkan pada sub fokus penelitian menunjukkan indikasi kemampuan aparatur dalam penyaluran dana, efektifitas kerja aparatur, kerjasama antar aparatur dalam penyaluran dana bantuan kepada usaha industri kecil dapat dikatakan sudah baik tetapi belum optimal. Sedangkan kinerja aparatur ditinjau dari keterampilan dan keahlian serta kedisiplinan aparatur kurang sesuai kualifikasi yang diharapkan.
 3. Kinerja aparatur ditinjau dari segi kapasitas dan kompetensi memang kurang memadai, karena sebagian besar aparatur yang terlibat dalam penyaluran dana bantuan, berpendidikan menengah kebawah, disamping itu juga kurang didukung dengan keterampilan dan keahlian yang sesuai bidang tugasnya, sehingga hasil kerja yang dicapai kurang optimal.
 4. Beberapa temuan penelitian yang menjadi faktor penghambat adalah masih terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki keterampilan dan keahlian, terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Terdapatnya petugas yang rangkap pekerjaan.

Saran-saran

Berdasarkan hasil beberapa kesimpulan di atas penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pegawai yang masih berstatus honorer dipertimbangkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan sehingga ketrampilan dan keahliannya meningkat.
2. Hendaknya peralatan kerja yang mendukung tugas dapat ditambah seperti komputer dan sepeda motor untuk operasional survai oleh tim teknis.
3. Hendaknya jika memungkinkan, adanya petugas khusus yang tidak rangkap jabatan dalam pelaksanaan penyaluran dana usaha kecil ini agar lebih efektif.
4. Hendaknya pimpinan kantor menegur dengan pendekatan personel jika ada petugas yang terlambat datang atau cepat pulang dari waktu yang ditentukan.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Indonesia. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 *tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Indonesia. Jakarta.

- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 *Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah*, Indonesia. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 *tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
- _____, Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 46 tahun 2007 *tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah*.
- _____, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 *tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah*.
- _____, Keputusan Gubernur. Nomor 26/Pemprov-KB/VIII/2008, *tentang Penyaluran Bantuan Dana kepada Usaha industri kecil*. Provinsi Kalimantan Timur.
- Abdul Wahab, Solichin, 1998, *Kebijaksanaan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Berkembang*; Skala Permasalahan dan Hakekatnya. Dalam Buku “Kebijakan Publik dan Pembangunan” IKIP, Malang.
- Abimanyu, Anggito, 1995, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, PAU- SE UGM bersama BPFE, Yogyakarta.
- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making*. New York : Holt, Rine hart and Winston.
- Erwidodo, 1999 *Modernisasi dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, dalam Basri, Hasan (ed), 1999, *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, O. Charles. 1991. *Pengantar Kebijakanaksanaan Publik*. Diterjemahkan Nashir Budiman. Rajawali, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Keban, T Yarimias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Kristiadi, J.B. 2001. *Administrasi/Manajemen Pembangunan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. 1992 *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan I, UI – Press, Jakarta.
- Moenir, H.A.S. 1997. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Plifo. B. Edwin. 1994. *Menajemen Personalialia*. Diterjemahkan Moh. Masud. Edisi keenam. Erlangga. Jakarta.

- Rachbini, Didik, J., 1999 *Peluang Kemitraan Kawasan dan Pedesaan, dalam Hasan Basri (ed), 1999 Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Schuler, Randall dan Stuart A. Youngblood, (1986), *Effective Personnel Management*, West Publishing Company, New York.
- Sunyoto, Agus. 1995. *Manajemen Sumber Manusia*, Badan Penerbit IPWI, Jakarta.
- Syahruddin, 1989, *Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Era Krisis*, Makalah pada Seminar Nasional HMJP Ekonomi, IKIP Malang
- Tambunan, Tulus, TH., 2000, *Perekonomian Industri : Beberapa Isu Penting Ghallia Indonesia*, Jakarta
- Tilaar, H.A.R. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*, Gramedia, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan. Dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Pembaruan*. Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1993. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Tulus, Moh. Agus. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam : Buku Panduan Mahasiswa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.